

Prof. Dr. jür. Andi Hamzah

Hukum Acara Pidana Indonesia

Edisi Kedua



SINAR GRAFIKA

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDISI KEDUA	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Istilah, Pengertian, dan Sistem	1
B. Tujuan Hukum Acara Pidana	7
C. Tempat Hukum Acara Pidana dalam Hukum	9
D. Asas-Asas Penting yang Terdapat dalam Hukum Acara Pidana	10
E. Ilmu-Ilmu Pembantu Hukum Acara Pidana	26
F. Sumber-Sumber Formal Hukum Acara Pidana In- donesia	29
BAB 2 SISTEM PENUNTUTAN PIDANA MODERN DI BERBAGAI NEGARA	33
A. Negara-Negara yang Tidak Menganut Secara Resmi Sistem Oportunitas atau Legalitas	33
B. Negara-Negara yang Menganut Asas Oportunitas	37
C. Sistem Penuntutan di Negara-Negara yang Me- nganut Asas Legalitas	42
D. Sistem Penuntutan di Amerika Serikat	44

BAB 3 SELAYANG PANDANG SEJARAH HUKUM	
ACARA PIDANA	47
A. Acara Pidana Sebelum Zaman Kolonial	47
B. Perubahan Perundang-undangan di Negeri Belanda yang dengan Asas Konkordansi Diberlakukan Pula di Indonesia	49
C. <i>Inlands Reglement</i> Kemudian <i>Herziene Inlands Reglement</i>	52
D. Acara Pidana pada Zaman Pendudukan Jepang dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan	55
E. Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 (Drt) Tahun 1951	58
F. Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	59
 BAB 4 PIHAK YANG TERLIBAT DALAM HUKUM	
ACARA PIDANA	64
A. Tersangka atau Terdakwa dan Hak-Haknya	65
B. Penuntut Umum	71
C. Penyidik dan Penyelidik	80
D. Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum	89
 BAB 5 HAKIM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN ..	99
A. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka	99
B. Kekuasaan Mengadili	107
C. Kekuasaan Kehakiman Setelah Orde Baru	112
 BAB 6 PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	119
A. Penyelidikan	119
B. Penyidikan	120
 BAB 7 PENANGKAPAN DAN PENAHANAN	128
A. Penangkapan	128

B.	Penahanan	129
C.	Pejabat yang Berwenang Menahan dan Lama-nya Penahanan	132
D.	Macam-Macam Bentuk Penahanan	136
BAB 8	PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN	139
A.	Pengeledahan	139
B.	Penyitaan	147
BAB 9	PENUNTUTAN	157
A.	Prapenuntutan	157
B.	Penuntutan	161
BAB 10	SURAT DAKWAAN	167
A.	Pengertian Surat Dakwaan	167
B.	Hal-Hal yang Diuraikan dalam Dakwaan	169
C.	Perubahan Surat Dakwaan	180
D.	Bentuk-Bentuk Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana	184
BAB 11	PRAPERADILAN	187
A.	Istilah dan Pengertian	187
B.	Acara Praperadilan	191
C.	Kasus-Kasus Praperadilan dalam Praktik	193
BAB 12	GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI	197
A.	Ganti Kerugian	197
B.	Rehabilitasi	206
C.	Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga (Kerugian Bagi Orang Lain)	207
D.	Ganti Kerugian Kepada Terpidana Setelah Penin-jauan Kembali	211

BAB 13 PERADILAN KONEKSITAS	214
A. Pengertian	214
B. Penyidikan Perkara Koneksitas	216
C. Penahanan dalam Perkara Koneksitas	225
D. Penuntutan Perkara Koneksitas	230
E. Praperadilan Perkara Koneksitas	231
F. Peradilan Perkara Koneksitas	232
 BAB 14 PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN .	 237
A. Penentuan Hari Sidang dan Pemanggilan	237
B. Pemeriksaan Perkara Biasa	238
C. Pemeriksaan Singkat	245
D. Pemeriksaan Cepat	246
 BAB 15 SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN.....	 249
A. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (<i>Positive Wettelijk Bewijstheorie</i>)	251
B. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu	252
C. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (<i>Laconviction Raisonnee</i>)	253
D. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (<i>Negatief Wettelijk</i>)	254
 BAB 16 ALAT-ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN	 258
A. Keterangan Saksi	260
B. Keterangan Ahli (<i>Verklaringen Van Een Deskundige, Expert Testimony</i>)	272
C. Alat Bukti Surat	275
D. Alat Bukti Petunjuk	277
E. Alat Bukti Keterangan Terdakwa	278

BAB 17	PUTUSAN HAKIM	282
A.	Acara Pengambilan Keputusan	282
B.	Isi Keputusan Hakim	285
C.	Formalitas yang Harus Dipenuhi Suatu Putusan Hakim	288
BAB 18	UPAYA HUKUM	290
A.	Upaya Hukum Biasa	290
B.	Upaya Hukum Luar Biasa	302
BAB 19	PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM	311
A.	Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Jaksa	312
B.	Biaya Perkara	316
C.	Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim	317
	DAFTAR PUSTAKA	321